

KINERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENYALURAN BANTUAN ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS

**Lalas Sulastri*, Dhea Fransiska Aprilyan, Muhammad Fauzi Nuriana, Rizka Siti
Jumiati, Siska Nuraeni, Siti Nur'Aminah**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas April

*Corresponding Email: lalassulastri@unsap.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of the Office of Social Affairs for Women's Empowerment and Child Protection in Distributing Aid Aid for Persons with Disabilities. The method used in the preparation of this PPA is a qualitative method, with the variable being Performance. The sampling technique used is purposive sampling, namely the sampling technique of data sources with certain considerations. The informants were the Head of Division, Head of Social Services and Rehabilitation, Staff for Social Services and Rehabilitation, PPDI (Indonesian Association of Persons with Disabilities) and Assistants for Persons with Disabilities, with this a total of 4 informants. Meanwhile, the Miles and Huberman model used in data analysis with the following steps: Data Reduction, Data Presentation, Conclusion Drawing/Verification, and Triangulation. The results of this study indicate that the performance of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection has been going well although there are still obstacles. The obstacle in this research is the limited budget for the distribution of aids. Efforts made by the Office of Social Affairs for Women's Empowerment and Child Protection are re-submitting the budget. It is recommended to increase the amount of the APBD budget, and improve the quality of the manufacture of assistive devices, as well as improve vehicle facilities for the distribution of assistive devices for persons with disabilities.

KeyWord: Human Resources, Organizational Performance, Disabilities.

PENDAHULUAN

Penyandang Disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang berhak memperoleh kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama untuk meraih dan memperoleh pendidikan untuk belajar, memiliki hak untuk kehidupan yang layak, dan mempunyai kemampuan dalam berkarya, menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai jual untuk dipasarkan.

Namun, realitanya pada saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan mereka dan permasalahan yang dihadapi penyandang cacat di Indonesia antara lain kurangnya akses informasi tentang pentingnya melakukan rehabilitasi, kurangnya fasilitas umum pada bangunan umum atau bangunan pemerintah yang mempermudah para penyandang cacat melaksanakan kegiatan sehari-hari, dan kurangnya akses pekerjaan untuk penyandang cacat, serta ketersediaan fasilitas khusus seperti alat-alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas yang masih terbilang minim.

Dalam hal ini Pemerintah harus lebih memperhatikan pentingnya fasilitas-fasilitas umum bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta menunjang kaum disabilitas agar sepenuhnya dapat hidup bermasyarakat. Jumlah penyandang disabilitas yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumedang yang telah terdata oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekitar 183 jiwa. Namun, baru sedikit yang dapat hidup mandiri secara sosial dan ekonomi, sehingga masih banyak penyandang disabilitas yang hanya meminta belas kasihan kepada orang lain. Hal ini sudah seharusnya perlu menjadi perhatian khusus dan menjadi tanggung jawab bersama antara pihak pemerintah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku instansi yang menangani masalah penyandang disabilitas.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fungsi yakni, perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial dan bidang Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui terdapat beberapa gejala yang mengarah terhadap terhadap masih rendahnya kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penyaluran Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas, dengan indikasi-indikasi antara lain:

1. Terbatasnya APBD yang diberikan pemerintah pusat kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini dibuktikan dengan hanya terdapat 35% disabilitas yang mendapat bantuan alat bantu dikarenakan kekurangan anggaran dalam setiap tahunnya.
2. Terdapat banyak penyandang disabilitas yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Hal ini dibuktikan masih banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki alat bantu, maka dari itu banyak penyandang disabilitas yang mengajukan permintaan bantuan.
3. Kurangnya ketepatan dalam pengumpulan data. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus dimana salah satu penyandang disabilitas diberikan bantuan akan tetapi pihak penyandang disabilitas tersebut ternyata memiliki taraf sosial yang tinggi (mampu).
4. Adanya pihak penyandang disabilitas yang menolak untuk diberikan bantuan. Hal ini dibuktikan dengan terdapat kasus dimana pihak penyandang disabilitas lebih memilih alat bantu yang mereka miliki ketimbang alat bantu yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyaluran bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas?
2. Apa saja hambatan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyaluran bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Natural Setting) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Sugiyono (2016: 1) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur kinerja organisasi publik menggunakan teori dari Lenvinne dalam Darmawi (2014) yang terdiri dari Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Sedangkan untuk mengukur faktor penghambat dalam pencapaian kinerja organisasi publik menggunakan teori dari Mangkunegara (2016) yang terdiri dari Faktor Ability dan Faktor Motivasi.

Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial, Staff Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, dan Pendamping Disabilitas. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan Studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Pengolahan dan analisis data yang digunakan melalui data display, reduksi data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja organisasi sebagaimana dijelaskan oleh Bastian dalam Aditama dan Widowati (2016) yaitu merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut. Selain itu, yang dimaksud dengan kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif (Wibawa dan Atmosudirjo dalam Pasolong, 2007).

Pengukuran kinerja organisasi publik diperlukan untuk menilai dan mengamati tidak saja tentang kinerja organisasi. Organisasi apakah sudah cocok dengan tujuan yang diharapkan atau belum melainkan juga tentang proses kerjanya apakah sudah berjalan dengan baik atau masih perlu perbaikan lebih lanjut. Sebagaimana yang dijelaskan Bryson dalam Pratiwi (2021) bahwa organisasi secara tipikal juga dikatakan sedikit jika apapun, tentang hasil mereka, baik historis maupun sekarang, membiarkan sendiri mengenai efek hasil-hasil tersebut, mempunyai klien, pelanggan atau pembayar. Contohnya badan kesejahteraan sosial dengan berbicara banyak mengenai anggaran staf, fasilitas-fasilitas fisik dan lain-lain, tetapi biasanya mereka dapat sedikit berbicara tentang efek yang mereka punya dari klien mereka.

Kinerja organisasi tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil atau tujuan, tetapi juga menekankan pada proses pelaksanaan dan sumber daya guna mencapai tujuannya. Untuk menghasilkan kinerja organisasi yang baik perlu memperhatikan tiga aspek yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas (Lenvinne dalam Darmawi, 2014).

Pertama, Responsivitas adalah kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat untuk menyusun prioritas pelayanan, serta pengembangan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik (Dwiyanto dalam Aditama dan Widowati, 2016).

Hasil wawancara terkait responsivitas di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Wawancara Responsivitas

No	Informan	Hasil Wawancara
1	Ketua Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial	Salah satu bentuk responsivitas yang kami lakukan adalah mendata jumlah penyandang disabilitas untuk diajukan sebagai penerima bantuan alat bantu disabilitas. Data yang sudah divalidasi maka akan proses selama 1 tahun. Data yang masuk lalu divalidasi dalam kasus kedaruratan biasanya tim redaksi cepat turun untuk membantu menangani kasus tersebut. Telah tepat dalam pemberian alat bantu, karena data yang telah di rekap dianalisis dan di telaah kembali. Aturan APBD sesuai sasaran dengan kebutuhan penerima bantuan alat bantu penyandang disabilitas.
2	Staff Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial	Kami melakukan rekap data penyandang disabilitas dan diajukan sesuai dengan anggaran, data yang diajukan akan diproses selama 1 tahun. Kecepatan dalam penyaluran alat bantu tergantung pada anggaran. Biasanya data yang diambil tahun ini akan direlasikan tahun depan. Untuk pemberian alat bantu sudah tepat diberikan kepada orang yang membutuhkan karena dilaksanakan pengecekan kembali pada saat penyaluran. Jumlah permintaan alat bantu yang disesuaikan dengan anggaran sesuai targetnya berdasarkan anggaran APBD.
3	PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia)	Data yang jelas ditampung dan divalidasi untuk ditindak lanjuti sesuai dengan kebutuhan, jika sudah divalidasi maka memproses dan dibantu pihak lain. Dalam proses kecepatan tergantung dengan adanya data yang lengkap sesuai prosedur yang ditetapkan. Sudah tepat dalam pemberian alat bantu, karena data yang di validasi di telaah kembali keberadaan lokasi tempat tinggal dan kebutuhannya, jika kebenarannya ada maka akan di proses. Kesesuaian target disesuaikan dengan segi anggaran yang ada.
4	Pendamping penyandang disabilitas	Jika ada laporan dari masyarakat, baru di data lalu di rekap untuk diajukan ke provinsi agar disesuaikan dengan anggaran yang ada. Untuk proses kecepatan, waktunya sesuai dengan anggaran. Biasanya anggaran bersumber dengan APBD yang bisa terleraskan selama 1 tahun. Untuk pemberian alat bantu sudah tepat diberikan karena data di evaluasi ulang mengenai kebutuhan dan kelayakannya.

Untuk kesesuaian target itu tergantung anggaran APBD yang diberikan pemerintah.

Sumber: Hasil Penelitian 2022.

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, menunjukkan hasil penelitian tentang responsivitas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumedang dalam penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas sebagai berikut.

1. Respon Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ketika ada pihak yang meminta alat bantu direspon dengan baik. Dengan melakukan beberapa prosedur yaitu, perekapan data dan validasi data. Lalu diajukan ke provinsi untuk diproses;
2. Kecepatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani penyaluran alat bantu bergantung pada anggaran, umunya bantuan terealisasi selama 1 tahun;
3. Ketepatan dalam pemberian alat bantu di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tepat pada sasarannya, di karenakan pada saat penyaluran, data di telaah dan di evaluasi terlebih dahulu; dan
4. Dalam ketepatan waktu penyaluran bantuan alat bantu disesuaikan dengan aturan APBD yang diberikan oleh pemerintah.

Kedua, Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Hal ini dapat dinilai dari analisis terhadap dokumen dan laporan kegiatan organisasi dengan mencocokkan pelaksanaan kegiatan dan program organisasi dengan prosedur organisasi dan ketentuan-ketentuan dalam organisasi (Dwiyanto dalam Aditama dan Widowati, 2016).

Hasil wawancara terkait responsibilitas di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Wawancara Responsibilitas

No	Informan	Hasil Wawancara
1	Ketua Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial	Para pegawai bekerja sesuai dengan potensi yang dimiliki secara profesional dalam penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan TKSK untuk mendata dari setiap Kecamatan kemudian data tersebut diajukan kepada Bupati. Dalam segi penyalurannya bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas sudah tepat sesuai dengan sasaran dan anggaran APBD yang diharapkan oleh masyarakat.
2	Staff Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial	Pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya menyediakan anggaran yang akan dikelola atau diproses oleh pengusaha alat bantu tersebut. Dalam SOP tidak ada kekhususan dari segi penyaluran bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, hanya diutamakan untuk pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam pembagian tugasnya, di data terlebih dahulu oleh PPDI, SLB, dan TKSK setelah itu di ajukan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian Pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan anggaran berupa alat bantu yang bisa dipesan sesuai dengan data yang telah diberikan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga bekerjasama dengan Pengusaha

			dan bernegosiasi terakhir Proses pembayaran oleh BKA (Badan Keuangan Anggaran).
3	PPDI Penyandang Indonesia)	(Persatuan Disabilitas	Dalam Aspek Pelatihan tidak diadakan secara khusus tetapi dapat dilihat dari pengalaman Pendamping yang secara khusus bekerja sama dengan PDDI. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan petugas lapangan (TKSK) dari awal pendataan sampai akhir kemudian diajukan ke bupati dan setelah itu data yang sudah fixs menerima alat bantu diserahkan kembali kepada pihak Dinas Sosial. Dalam pembagian tugas, saat pendataan pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan TKSK dan SLB tetapi apabila ada kesalahan dalam proses pendataan maka akan diberikan alat bantu yang baru sesuai dengan kebutuhan pihak penyandang disabilitas.
4	Pendamping disabilitas	penyandang	Sebelum diberikannya alat bantu pihak Penyandang disabilitas di ukur terlebih dahulu seperti kaki palsu dan tangan palsu. Untuk SOP laporannya didata terlebih dahulu dari setiap daerah dan diajukan ke pihak APBN, APBD, CSR, atau Baznas. Setelah itu diberikan alat sesuai dengan kebutuhan. Pembagian tugas dilakukan secara bersama-sama mulai dari frekuensi data, Validasi data seperti pengukuran alat bantu sampai ketahap penyaluran.

Sumber: Hasil Penelitian 2022.

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, menunjukkan hasil penelitian tentang responsibilitas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumedang dalam penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas sebagai berikut.

1. Dalam Kompetensi teknis pelayanan dan pembagian alat bantu penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan potensi yang dimiliki, pengalaman, dan disesuaikan dengan anggaran yang sesuai dengan prosedur;
2. Pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah mengikuti instruksi-instruksi sesuai dengan peraturan SOP dan bekerjasama dengan Petugas lapangan (TKSK); dan
3. Dalam pembagian tugas di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilaksanakan sesuai dengan tufoksinya masing-masing.

Ketiga, akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut terpilih karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat (Dwiyanto dalam Aditama dan Widowati, 2016).

Hasil wawancara terkait akuntabilitas di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Wawancara Akuntabilitas

No	Informan	Hasil Wawancara
1	Ketua Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial	Sebelum dilakukan penyaluran pihak penyandang disabilitas datang ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengukur alat

			bantu yang akan digunakan supaya sesuai dengan ukurannya, apabila berhalangan untuk datang maka bisa dibantu oleh pihak PDDI, TKSK. Untuk kesalahan yang melanggar pihak dari setiap penyandang disabilitas tidak diberikan sanksi, dan untuk alat bantu yang sudah disalurkan mau dipakai atau tidak itu kembali lagi ke Individunya masing-masing. Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai saat ini tidak ada yang melanggar, apabila ada yang melanggar akan diberikan teguran lisan/ teguran tertulis, jika pegawai tersebut masih melakukan kesalahan yang sama maka akan dilaporkan.
2	Staff Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial		Untuk prosedur penyalurannya dimulai dari pemanggilan langsung pihak penyandang disabilitas ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, apabila keadaan tidak memungkinkan datang ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka dibantu oleh pihak PDDI, TKSK. Tidak ada sanksi, apabila alat bantu sudah disalurkan mau digunakan atau tidak itu sesuai dengan Individu masing-masing. Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai saat ini tidak ada yang melanggar, tetapi jika ada yang melanggar akan diberikan berupa teguran lisan, tertulis. Apabila masih melakukan kesalahan tersebut berulang kali maka solusi terakhir yaitu dilaporkan karena penyalahgunaan.
3	PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia)		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak observasi ke lokasi atau daerah yang terdapat orang-orang penyandang disabilitas. Tidak ada sanksi, bilamana ada akan diberikan sanksi yaitu berupa teguran. Saat ini tidak ada yang melanggar, namun apabila ada yang melanggar maka akan diberikan teguran (lisan maupun tulisan).
4	Pendamping disabilitas	penyandang	Untuk penyaluran pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memanggil pihak penyandang disabilitas untuk datang dan menyesuaikan kebutuhan penyandang disabilitas tersebut. Setelah itu dipesan dan diberikan ke pihak penerima di penyandang disabilitas. Untuk yang melanggar tidak ada, mungkin yang sering dilakukan seperti ketinggalan persyaratan baik itu berupa Fotocopy KTP, KK dan lain sebagainya. Apabila ada yang melanggar maka akan diberikan peringatan berupa lisan/tertulis.

Sumber: Hasil Penelitian 2022.

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, menunjukkan hasil penelitian tentang akuntabilitas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumedang dalam penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas sebagai berikut.

1. Dalam proses penyaluran alat bantu dilakukan sesuai prosedur, yaitu dengan mengundang pihak penyandang disabilitas untuk datang ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengukuran alat bantu.
2. Untuk pertanggung jawaban alat bantu apabila sudah disalurkan maka itu kembali lagi ke Individu mau atau tidaknya alat bantu tersebut digunakan dan tidak diberikan sanksi

untuk orang-orang penyandang disabilitas yang melanggar, kecuali jika pun ada akan diberikan teguran.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini tidak ada yang melanggar, jika ada yang melanggar ketentuan kebijakan pada penyaluran bantuan alat bantu maka akan diberikan teguran yaitu teguran lisan/ tertulis, yang terakhir dilaporkan karena penyalahgunaan.

Dalam meningkatkan kinerja organisasi menjadi lebih baik lagi tentunya menghadapi beberapa kendala ataupun hambatan, begitupun dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang. Hambatan pencapaian kinerja organisasi yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas yaitu:

1. Hambatan dari aspek ability. Hal tersebut diantaranya berasal dari: 1) kerjasama penyaluran bantuan alat bantu penyandang disabilitas adanya kesulitan dalam segi geografis antara pegawai dan penerima bantuan untuk itu pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta bantuan dari TKSK, Desa, Kecamatan; dan 2) tingkat kemampuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kemampuannya adalah terbatasnya kendaraan dan sumber daya manusia untuk penyaluran bantuan alat bantu kepada penyandang disabilitas.
2. Hambatan dari aspek motivasi. Hal tersebut diantaranya berasal dari: 1) terbatasnya anggaran yang menyebabkan terhambatnya dalam aktivitas dan merealisasikan keinginan untuk menyalurkan bantuan alat bantu; dan 2) keterbatasan tempat pelayanan yang ada di Dinas.

Sebagaimana yang dikemukakan Mangkunegara (2016) faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi adalah: 1) Faktor Kemampuan. Secara psikologis, kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan reality (*knowledge + skill*), artinya pegawai yang memiliki *IQ* di atas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (*the right man in place, the man on the right job*); dan 2) Faktor Motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).

SIMPULAN

Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penyaluran Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas sudah berjalan dengan baik, namun belum berjalan dengan maksimal hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan alat bantu yang sesuai dengan permintaan yang diajukannya. Faktor yang menghambat Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penyaluran Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas yaitu minimnya anggaran. Kekurangan anggaran dapat dilihat dari anggaran APBD yang diberikan karena adanya penggalangan dana untuk korban covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, P.B & Widowati, N. 2016. Analisis Kinerja Organisasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 34(11),e77-e77
- Fandi. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Konsep dan Indikator*. Pekan Baru: Zanafa Publishing
- Affendhie. 2007. *Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek)*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Anggara. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Ambarwati. 2018. *Perilaku dan Teori Organisasi*. Malang: Media Nusa Cteative
- Bintoro dan Daryanto. 2017. *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan. Cetakan 1*. Yogyakarta: Gava Media
- Chitrasari Nitha. 2012. Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam penanganan pengemis di Kota Cilegon. *Skripsi*. Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serang.
- Darmawi, Edy. 2014. Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Perspektif Good Governance (Studi Deskriptif Mengenai Kinerja Aparatur Kelurahan Ditinjau dari Dimensi Akuntabilitas, Responsivitas dan Responsibitas di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma. 3. 707-61.
- Edy Sutrisno. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan ke-8*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Fahmi, irham. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Gie, The Liang. 2011. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty
- Hasibuan. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi, Cetakan Ketiga Belas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kaswan. 2017. *Psikologi Indistri dan Organisasi. Cetakan 1*, Bandung: Alfabeta
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2016. *Perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode penelitian edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Mulyono. 2017. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2017
- Mulyono, Danan Dwi. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Negara Surakarta. [online] 2711-1-20140319. [25 November 2020]
- Murtie Afin. 2016. *Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Maxima
- Mursal, Muhammad. 2019. Kinerja pegawai dalam pengelolaan program penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Makasar. *Skripsi*. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Pratiwi. 2021. Kajian Praktis. Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik. *Jurnal Wacana Kinerja*.
- Rernawan. 2011. *Budaya Organisasi dalam perspektif Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Rismawati dan Mattalata. 2018. *Evaluasi Kinerja: Penilaian kinerja Atas Dasar Prestasi kerja Berorientasi kedepan*. Makasar: Cilebes Media Perkasa
- Sahar B. Muh. 2015. Kinerja Dinas Sosial dalam Pelaksanaan program Pembinaan Anak jalanan di Kota Makasar. *Skripsi*. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Universitas Hasanudin.
- Silalahi. 2016. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian kombinasi Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Syafri. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Thoha. 2014. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ulber silalahi. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama
- Widjaja. 2014. *Pengetahuan Dasar Auditing*. Jakarta: Harvarindo